



Di Bali, 20 Persen Rekomendasi BPK Belum Ditindaklanjuti Pemda

Denpasar (Bali Post) -

Pemerintah daerah (pemda) di Bali baik provinsi maupun kabupaten/kota ternyata belum sepenuhnya taat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Secara umum, di Bali masih terdapat 20 persen rekomendasi BPK atas temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah belum tuntas ditindaklanjuti. Di sisi lain, sebagian besar pemerintah kabupaten di Bali belum mampu mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi optimalisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jumat (24/4) kemarin. Acara ini dihadiri Ketua BPK RI, anggota III dan anggota VI BPK RI, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Gubernur Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali, Pimpinan DPRD Bali, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali serta instansi terkait.

Dalam sambutannya, Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, mengungkapkan, dari 200 ribu lebih

rekomendasi atas temuan BPK secara nasional, yang sudah ditindaklanjuti baru rata-rata 54 persen. Sementara di Bali, total rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mencapai rata-rata 80 persen. "Jadi, Bali di atas rata-rata nasional dan Bali relatif lebih bagus dari daerah lain. Bisa jadi orang Bali lebih jujur dari daerah lain. Dan ini mesti kita bangun secara nasional," kata Harry Azhar Azis.

Kendati jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti pemda

di Bali jauh di atas rata-rata nasional, BPK mendorong agar rekomendasi tersebut bisa tuntas ditindaklanjuti, jangan sampai ada yang mandek. "Kami dorong agar pemda proaktif menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK salah satunya rapat koordinasi. Ini tugas bersama, BPK dan pimpinan daerah termasuk DPRD-nya," tegasnya.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Sjaifrudin Mosi, menambahkan BPK selalu memantau kinerja pemda dalam pelaksanaan tindak lanjut reko-



Sambung an

mendasi hasil pemeriksaan dan mendorong agar hal tersebut dilakukan dengan optimal.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya mengatakan rekomendasi BPK atas temuan laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat bermanfaat pada perbaikan sistem tata kelola keuangan dan aset daerah. Ia pun menegaskan Pemda Bali berkomitmen menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Namun, Pastika mengakui ada beberapa rekomendasi yang belum tuntas ditindaklanjuti. Hal ini karena tindak lanjut tersebut membutuhkan waktu bertahap misalnya terkait temuan dalam pengelolaan aset dengan rekomendasi agar pemda segera menyertifikasikan aset-aset berupa tanah yang belum bersertifikat ini. "Pen-

ertifikatan tanah tentu butuh waktu," tegasnya. Pastika juga mengakui ada proses tindak lanjut rekomendasi temuan BPK yang mengalami kebuntuan. Namun, Pastika tidak menyebutkan secara detail bagaimana kebuntuan yang dimaksud. "Saya berharap dirumuskan jalan keluar, agar penyelesaian rekomendasi (temuan BPK) tidak berlarut-larut dan agar bisa tuntas," katanya.

Pastika menambahkan, sesuai hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2014, akumulatif dari tahun 2005 hingga 2014 pada Pemprov Bali tercatat total ada 427 temuan dengan 1.026 rekomendasi. Dari jumlah itu, katanya, sudah mendapat penanganan tindak lanjut dari SKPD dan lembaga terkait lainnya, walau ada rekomendasi yang statusnya dalam proses penyelesaian. (wid)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 1



Dugaan Korupsi Pavingisasi di Denpasar Masuk P-19

Denpasar (BaliPost) -

Berkas perkara atas dugaan penyelewengan atau dugaan korupsi proyek pavingisasi Jalan Gajah Mada, Denpasar, sudah masuk tahap P19. Sedangkan dalam perkara ini, dua tersangka sudah ditetapkan Polresta Denpasar, yakni Adhi Widhiadnyana selaku Direktur PT Alit Wirajaya dan Ngurah Kosala Cakrawethi, Direktur CV Unika Desain. Berkas perkara ini tidak dijadikan satu, melainkan dilakukan secara terpisah.

Informasi dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, untuk berkas tersangka Adhi, sudah dikembalikan dan disertakan surat P-19. Sedangkan untuk tersangka Ngurah Kosala, baru diterima dan segera dikirim P-19 ke penyidik

Polresta Denpasar. Kasi Pid-sus Kejari Denpasar Wayan Sutarjana membenarkan sudah adanya pengembalian berkas untuk perkara dugaan korupsi pavingisasi di Denpasar tersebut. "Sudah Jumat lalu," katanya kepada wartawan, Jumat (24/4) kemarin.

Dia menambahkan, berkas Adhi lebih dahulu masuk tahap P-19. "Untuk tersangka Kosala, menyusul," tegasnya.

Informasi lainnya yang diterima *Bali Post*, pihak jaksa banyak memberikan petunjuk pada penyidik kepolisian guna proses penyempurnaan berkas. Yang menonjol adalah agar penyidik menyertakan pendapat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Pasal-

nya, pendapat lembaga tersebut diperlukan untuk menentukan alur dari pemegang kebijakan dalam proyek tersebut. Hal itu untuk memastikan keterlibatan dari pihak Pemkot Denpasar, karena yang jadi tersangka saat ini hanya dari rekanan. Sehingga ada kemungkinan ada tersangka lain, yang memiliki kebijakan menyangkut proyek tersebut.

Selain saksi LKPP yang belum disertakan dalam berkas penyidik, saksi ahli dari Unud yang mengungkap tentang volume yang berkurang, juga belum lengkap. Jaksa memberikan petunjuk, harus dimintakan juga kajian mengenai penyusutan volume yang terjadi dalam pengerjaan paving tersebut. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 28 April 2015

Hal : 3



Format Baru Pelaporan BOS

Satu Sekolah Nyaris Telat

Denpasar (Bali Post) –

Format baru penyusunan laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke BPK masih cukup membingungkan pihak sekolah. Hal ini terbukti dari masih adanya sekolah di Denpasar yang nyaris terlambat menyetor laporan. “Ada satu sekolah yakni SMA Harapan Mulia. Itu kita kejar karena kemarin (lusa - red) batas waktu penyetoran laporan. Tetapi tidak masalah, karena akhirnya sudah disetor, dan sudah semua SMA/SMK menyetorkan laporan penggunaan dana BOS,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Kota Denpasar I Wayan Supartha, Jumat (24/4) kemarin.

Sebelumnya, pada Rabu (22/4) lalu, pihaknya telah mengingatkan pihak sekolah agar segera menyetorkan laporan penggunaan dana BOS. Ketika itu, ada lima sekolah lagi yang belum menyelesaikan laporannya. Pihaknya mengaku memaklumi masih ada sejumlah sekolah yang baru bisa menyelesaikan laporan menjelang batas waktu habis. Ini dikarenakan adanya format baru penyusunan laporan. Ke depan, Supartha berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi sekolah agar secara reguler menyusun laporan tersebut.

Dikatakannya, laporan penggunaan dana BOS tersebut nantinya akan diaudit oleh BPK. Supartha pun kembali mengingatkan agar pihak sekolah menyusun laporan dengan baik dan benar, sehingga penggunaan dana sesuai dengan yang dilaporkan. Apalagi, sekolah saat ini banyak mendapat kucuran dana baik dari APBN maupun APBD.

Di sisi lain, perencanaan anggaran juga harus cermat agar dana yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada dana lebih, harus dikembalikan. “Kadang-kadang ada dana BOS yang tidak habis pakai. Itu agar segera dikembalikan. Kami tidak bisa mungkiri kalau sampai sekarang kadang ada sekolah yang bingung, bagaimana mengembalikannya,” katanya.

Dana BOS diberikan bervariasi tiap sekolah, tergantung jumlah siswa. Per siswa tingkat SMA/SMK diberikan Rp 1,2 juta dalam setahun. Pemanfaatan dana tersebut dibagi dalam 16 item, seperti peningkatan pengembangan kompetensi guru dan pemeliharaan alat. (kmb25)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 2



Kasus Dermaga Gunaksa

Penyidik Tegaskan Mantan Kadis PU Tak Terlibat

Semarangpur (Bali Post) -

Beberapa nama yang tercatat dalam kasus korupsi pengadaan lahan dermaga Gunaksa kembali diungkit-ungkit karena tidak ikut terjerat sebagai tersangka. Salah satunya Ida Bagus Adnyana, mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Klungkung. Pasalnya, nama bersangkutan sempat masuk di dalam tim 9 pada tahun 2008. Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung pun angkat suara menjabarkan beberapa nama yang masuk dalam tim, namun terbukti tidak terlibat.

Kasi Intel Kejari, Suhadi mengungkapkan sejumlah nama seperti, IB Adnyana, mantan Kadis PU Klungkung terbukti tidak terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa. Menurutnya, SK tim mengurus persoalan pengadaan lahan Dermaga Gunaksa tersebut ditentukan secara eksovisio. Artinya, siapa saja yang menjabat sebagai Kadis PU saat itu namanya akan masuk dalam tim Sembilan.

Termasuk IB Adnyana yang saat itu menjadi Kadis PU pada tahun 2008. Pihaknya menjelaskan, para tersangka yang saat ini disidangkan adalah anggota tim Sembilan yang terbukti terlibat pada saat terjadi pembayaran. Ini terlihat dari penandatanganan saat pembayaran tersebut. Sedangkan saat itu, tidak ada tanda tangan dari IB Adnyana.

Selain IB Adnyana, hasil dari

pemeriksaan juga menyebutkan seluruh anggota tim 11 tidak terlibat dalam kasus korupsi pengadaan tanah ini. Menurutnya, anggota tim 11 sama sekali tidak mengetahui telah diberikan SK sebagai tim penilai harga lahan Dermaga Gunaksa. Bahkan, mereka tidak pernah melihat SK penunjukan tersebut. "Mereka tahunya ikut di dalam tim 11 setelah dipanggil kejaksaan," jelas Suhadi.

Di sisi lain, hasil pemeriksaan yang memperkuat tidak terlibatnya tim 11 ini dari proses musyawarah kesepakatan ganti rugi. Pasalnya, tanpa mendapatkan nilai harga dari tim 11, proses musyawarah tentang besarnya ganti rugi sudah dilakukan kesepakatan. Kesepakatan yang dirasa sangat *grasa-grusu* ini melibatkan mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra.

"Mestinya sesuai dengan prosedur harus meminta dulu hasil penilaian harga tanah dari tim 11. Tapi kok tanpa mendapatkan nilai, ujug-ujug langsung musyawarah menentukan besarnya ganti rugi. Kesepakatan itu pun dengan Pak Candra sekalian," bebarnya.

Mantan Kadis PU Klungkung IB Adnyana mengaku saat menjadi Kadis PU tahun 2008, pihaknya sudah menganulir SK tim Sembilan tersebut. Menurutnya, SK yang dibuat itu telah menyalahi hukum karena pengurusan tanah di atas satu hektar bukan lagi wewenang SKPD dalam hal ini Dinas PU Klungkung. "Setelah menjadi Kadis PU tahun 2008 saya sudah menanyakan kepada Sekda Ketut Janapria karena SK ini cacat hukum. Lalu SK itu dibawa ke Bupati Klungkung saat itu I Wayan Candra. (dwa)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 20



Kasus PDAM Karangasem, Kejati Temukan PMH

Denpasar (Bali Post) -

Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta mengumpulkan data termasuk turun langsung ke Karangasem, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus PDAM Karangasem. "Ya, setelah memeriksa saksi dan setelah dilakukan konfirmasi, memang sudah ditemukan PMH," tandas Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, Jumat (24/4) kemarin.

Jika sudah ditemukan PMH, siapa tersangkanya? Ashari mengatakan bahwa tim penyidik masih terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Di samping itu, pihak penyidik juga sedang menunggu audit BPKP untuk memastikan kerugian negara dalam perkara ini. Di samping menunggu audit BPKP, penyidik saat ini sedang mencari pembanding speks pipa. "Ya, harus ada speks pembanding sebagai dasar audit," sebutnya saat ditanya perkembangan penyelidikan kasus PDAM yang saksi-saksinya diperiksa di lantai dua Kejati Bali.

Informasi lain menyebutkan, untuk persoalan PDAM Karangasem yang besar bukan pada persoalan pipa atau terkait pengadaan air. Namun, yang justru lebih besar adalah pengadaan tanahnya. "PDAM soal amprahan baru ini, sebenarnya kasusnya kecil. Kalau bisa dapatkan data, soal pengadaan lahan nanti yang besar," sebut salah seorang sumber di kejaksaan.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah petugas kejaksaan seperti Raka Arimbawa, Agus, dan penyidik lainnya kerap melakukan pemeriksaan saksi atas dugaan penyelewengan di PDAM Karangasem. Pemeriksaan tidak dilakukan di Pidsus, namun di ruangan jaksa fungsional. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 3



Ketua BPK-RI Apresiasi Respons

Cepat Pemkab Tabanan

MESKI sempat terpuruk dalam hal pengelolaan keuangan daerah hingga diganjar *disclaimer* oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada 2013 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan tidak lantas diam begitu saja. Respons cepat langsung diambil Pemkab Tabanan dengan melakukan serangkaian perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK pada masa itu. Hasilnya, pada 2014 lalu Tabanan mampu mendongkrak predikat *disclaimer* menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Respons cepat Pemkab Tabanan tersebut mendapat apresiasi positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, apresiasi itu diungkapkan langsung Ketua BPK RI Dr. H Harry Azhar Azis, M.A., Jumat (24/4) kemarin. Harry Azhar hadir langsung dalam acara Sosialisasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di kantor Pemkab Tabanan. Dalam kesempatan itu, Harry Azhar didampingi anggota BPK RI VI yang mewilayahi Indonesia Timur Prof. Dr. Bar-

ullah Akbar, MBA., CMPM, serta Ketua BPK-RI Perwakilan Bali Arman Syifa. Sedangkan dari Pemkab Tabanan hadir langsung Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti, Wakil Bupati I Komang Gede Sanjaya, Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Serta seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Tabanan.

Menurut Harry Azis, respons Pemkab Tabanan terhadap rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam beberapa tahun terakhir terbilang menarik. Karena respons yang diberikan terhadap rekomendasi BPK sangat cepat. Bahkan, dia mengungkapkan, tingkat responsnya mencapai 92 persen dari sekitar 700 lebih total item yang direkomendasikan untuk dibenahi. "Dari permintaan kita untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP), Tabanan tegolong cepat," ujarnya.

Hal. 27

Temuan BPK



BPK - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat menerima Ketua BPK RI Dr. H Harry Azhar Azis, M.A. dan Ketua BPK-RI Perwakilan Bali Arman Syifa.

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 1



Temuan BPK

Dari Hal. 1

Meski demikian, dia mengakui ada beberapa persoalan yang selalu masuk sebagai temuan BPK setiap tahunnya. Seperti persoalan aset dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kewenangan pemungutannya telah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, khusus untuk aset, persoalan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Di antaranya perpindahan aset dan pengelolaan dari sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah itu sendiri yang kurang teliti. Sehingga ini patut mendapatkan perhatian lebih.

"Karena itu kita minta ke pemerintah daerah untuk proaktif berkonsultasi kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apalagi sudah ada instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada BPKP untuk terus membina pemerintah daerah yang masih bermasalah,"

beberny.

Sementara untuk persoalan piutang PBB, Harry Azis mengaku sempat menyampaikan persoalan ini kepada Presiden secara langsung. Karena, menurutnya, persoalan piutang PBB ini tidak sepenuhnya berada di daerah. Mengingat kewenangan untuk memungut sebelumnya dipegang oleh Direktorat Pajak. Karena itu sampai sejauh ini, koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri masih dilakukan. Apakah tetap memasukkan piutang PBB ke dalam pemeriksaan atau dikeluarkan.

"Jadi apakah nantinya perlu Peraturan Menteri Keuangan yang baru. Tetapi tetap walaupun ada aturan baru bukan berarti masalahnya selesai begitu saja. Tetap masuk dalam pemeriksaan namun diselesaikan dengan cara tersendiri. Apakah (piutang) itu tidak masuk neraca keuangan daerah atau yang lainnya," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Eka Wiryastuti menyatakan san-

gat berterima kasih terhadap kedatangan Ketua BPK RI beserta jajarannya ke Kabupaten Tabanan. Mengingat selama ini, Tabanan sama sekali tidak pernah dikunjungi langsung oleh pimpinan BPK. "Sepanjang sejarah ini yang pertama kalinya. Tentu saya sangat berterima kasih sekali," ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi dari BPK tersebut merupakan hal penting. Karena ini bisa menjadi motivasi untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena itu, dia berharap momen tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh jajarannya agar ke depan mampu menciptakan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang lebih baik. "Apalagi aturan-aturan dari pusat banyak yang sering berubah. Sehingga kita di daerah harus bisa menyesuaikan dan mengubah sistem kerja SDM kita," tandas Bupati Eka. (ad2127)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 23



Ketua DPRD Bali Bertanya ke Presiden

Jangan Ditunggangi

Kepentingan Investor

PANSUS Ranperda Rancangan In-duk Pariwisata Daerah (Riparda) Bali telah berkonsultasi ke Kementerian Pariwisata di Jakarta. Konsultasi ini terkait adanya kontradiksi antara Ranperda Riparda dengan Peraturan Presiden (Perpres) 51/2014 tentang pemanfaatan Teluk Benoa. Walaupun pihak Kemenpar juga mengakui adanya kontradiksi, namun disarankan Pansus

untuk bertanya ke Presiden Jokowi. Atas petunjuk itu, telah disepakati Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama yang akan bertanya secara resmi ke Presiden Joko Widodo.

Atas ditunjuknya Adi Wiryatama untuk bertanya kepada Presiden, Bendesa Adat Kelan I Made Sugita, Jumat (24/4) kemarin, mengingatkan agar Ketua DPRD Bali itu membela kepentingan Bali. Jangan

sampai mereka membawa kepentingan investor untuk memuluskan rencana revitalisasi berbasis reklamasi di Teluk Benoa.

“Saya sangat berharap agar konsultasi itu tidak melenceng dan hanya memuluskan jalan investor untuk mereklamasi Teluk Benoa. Jangan lirik kiri-kanan, harus tetap pada rel aspirasi yang disuarakan masyarakat selama ini. Sebagai orang Bali kita harus bicara tujuan hidup dan

filosofi Tri Hita Karana. Pemerintahan Bali harus cermat, cerdas melihat Bali ke depan,” ujar Sugita.

Salah satu hal yang harus menjadi bahan konsultasi adalah apa benar masyarakat Bali menginginkan reklamasi Teluk Benoa dan siapa yang memohon dilakukannya reklamasi.

Hal. 27

Tidak Merusak

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 1



Sambungan

Tidak Merusak

Dari Hal. 1

Dalam peraturan perundang-undangan, revitalisasi memang dimungkinkan. Tetapi konsep revitalisasi justru untuk menguatkan objek dan tidak merusak tatanan yang sudah ada. Jadi, revitalisasi Teluk Benoa bukan dengan jalan reklamasi. "Kalau bakau mati, wajar ditanami. Terjadi pendangkalan, wajar dikeruk. Tetapi kalau direklamasi, ya... hilanglah teluknya jadi daratan. Kan justru tidak nyambung dengan konsep revitalisasi," kata Sugita yang juga anggota DPRD Badung ini.

Sugita juga kembali meminta Presiden segera mencabut Perpres 51/2014 lantaran tidak sejalan dengan aturan di atasnya. Roh pembangunan kepariwisataan Bali harus kembali pada adat dan budaya. Pihaknya mengaku tidak alergi dengan investor luar. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, apakah investor itu membangun Bali ataukah hanya membangun di Bali. Sekarang Bali membutuhkan investor yang mampu membangun Bali dan tidak semata membangun di Bali yang notabene hanya merusak alam Bali.

Sebelumnya (BP, 24/4),

Panitia Khusus Riparda 2014-2029 DPRD Bali berkonsultasi dengan Kementerian Pariwisata di Jakarta, Kamis (23/4). Sekretaris Pansus Riparda A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. mengungkapkan hasil konsultasi dengan Sekretaris Ditjen Destinasi Lokot Ahmad Enda. Lokot merupakan salah satu perancang Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan PP No.50 Tahun 2011 tentang Riparnas.

Kata Adhi, pihak Kemenpar telah memberikan masukan terkait Perpres No.51 Tahun 2014 yang selama ini disebut kontradiktif dengan Riparda Provinsi Bali. "Biro Hukum Kemenpar berpendapat, Perpres No. 51 Tahun 2014 apabila merunut dari Perda RTRW Bali yang berdasar pada RTRW Nasional, kawasan Tanjung Benoa masuk kawasan pariwisata. Maka yang berlaku adalah Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan PP No.50 Tahun 2011 tentang Riparnas, sehingga aturan yang tak sejalan dengan itu dapat dikatakan gugur dengan sendirinya," papar Adhi.

Apakah itu artinya Perpres 51/2014 secara otomatis gugur? "Namanya konsultasi tidak bisa memutuskan, dan

pemahaman biro hukum selama bertentangan dengan hukum di atasnya maka otomatis gugur. Tanjung Benoa sebagai kawasan pariwisata yang di dalam kawasan tersebut ada daya tarik wisata dalam sudut pandang geografis, termasuk teluk harus berpatokan kepada UU Pariwisata dan PP 50. Apabila ada yang bertentangan maka otomatis gugur.

Politisi PDI-P ini menambahkan, Kemenpar juga menyarankan untuk meminta penegasan dari Presiden sebagai bagian dari hak prerogatif. Pasalnya, Perpres 51/2014 diakui memang menunjukkan kontradiktif pada saat membahas makna revitalisasi. Untuk itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama yang juga ikut berkonsultasi akan bertanya secara resmi ke Presiden Joko Widodo. "Revitalisasi yang dimaksud dalam PP 50 dalam bayangan penyusun adalah sebagai contoh untuk kawasan seperti Toraja dan Danau Toba yang mengalami degradasi kunjungan. Sementara Bali dan khususnya Tanjung Benoa dalam laporan LKPJ Gubernur menunjukkan peningkatan kedatangan tamu baik asing maupun domestik," ujar Adhi menambahkan. (kmb25)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 27



BOS

Lebih Ketat, Sekolah Bingung

KEBIJAKAN pemerintah pusat mengenai pengaturan format baru penyusunan laporan ke BPK terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), cukup membingungkan beberapa sekolah. Pasalnya ke depan format baru penyusunan laporan BOS akan lebih diperketat lagi, karena adanya beberapa masalah dan penyelewengan dana BOS selama ini di beberapa tempat.

Denpasar misalnya, nyaris terlambat menyeter laporan BOS ke pusat, lantaran aturan baru tersebut baru saja diterapkan pemerintah pusat. "Ada satu sekolah yang belum menyeter laporan BOS hingga batas waktu yang ditentukan," ujar Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Kota Denpasar I Wayan Supartha, dihubungi Jumat kemarin (24/4). **(hen/han)**

Edisi : Sabtu, 25 APRIL 2015

Hal : 24



Warung Global

Simantri Bermasalah,

Bantuan Mestinya Ditunda

GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika batal menunda sementara bantuan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) tahun 2015. Mantan Kapolda Bali ini malah menarik ucapannya kembali. 50 kelompok Simantri tahun ini akhirnya mendapat bantuan masing-masing Rp 225 juta. Menyikapi hal ini, kawan *Global* pada acara *Warung Global Interaktif* yang disiarkan *Radio Global FM* berharap bantuan hanya disalurkan pada kelompok yang layak dan berkembang. Sedangkan kelompok yang bermasalah, bantuannya harus ditunda. Pada acara yang juga dipancarluaskan *Radio Singaraja FM*, *Swara Negara* dan *Radio SWiB Amlapura* ini, kawan *Global* mendesak aparat hukum agar oknum yang menyalahgunakan bantuan ditindak.

Gung Derah di Denpasar mengatakan program Simantri ini bagus. Ia juga sepatutnya dengan tujuan ini untuk memberdayakan pertanian.

siapa yang menjamin hal ini? Jangan yang dapat sumbangan saja, tampil di TV sehingga dikatakan berhasil untuk sekecil popularitas.

Program di atas meja tidak ada yang mengalahkan setelah turun ke bawah. Di situ baru menemui banyak kendala apalagi sekarang sudah zamannya korupsi karena pembelajaran dari atas sehingga sedikit

Gubernur berikutnya bisa melanjutkan program ini, meskipun beberapa program gubernur tak disukainya. Perlu dilakukan pendampingan dan evaluasi rutin terhadap program Simantri.

Kemarin sempat menyatakan menunda. Werdha di Gianyar kembali berpendapat, memang program ini bagus tujuannya agar Simantri ini tepat guna dan berhasil guna. Kemarin sempat ada kasus penggelapan Simantri, ia hanya ingin pelakunya diusut tuntas. Menurutnya Simantri bukanlah satu-satunya mempertahankan pertanian tapi hanya salah satunya, sebaiknya dibenahi jika ada kesalahan.

Fokus pada bantuan Simantri, Tut Dawi di Badung apakah bantuannya ini nantinya dikembalikan lagi ke pemerintah atau bantuan bergulir. Mengelola uang tunai itu sangat susah. Ia menyarankan sebaiknya pemerintah hanya memberikan bantuan awal, jika dalam perkembangannya tidak berjalan baik kelompok itu sebaiknya tak diberikan bantuan lagi.

Fera di Tabanan tetap memberikan usulan agar pen-

saja ada celah, jangan harap program dapat berjalan sesuai dengan harapan. Lanjutkan saja nanti habis masa jabatan, agar BPK yang menilai apakah ini menjadi temuan. Demikian pendapat Made Jujur di Denpasar. (sikha)

gawasan dengan sungguh-sungguh. kemudian lihat juga si penerima bantuan benar membutuhkan atau tidak. Pokoknya hati-hati memberikan bantuan. Sementara Ayu di Petang juga mau mendapat bantuan itu, karena sangat baik tujuannya. jika ini terbukti berhasil dan baik, alangkah indahnya. Bantuan pada intinya baik hanya jangan sampai rakyat kecil menjerit.

Jony di Payangan melihat bantuan adalah positif, program ini sudah berlangsung lama, jika ada evaluasi memang sebaiknya harus diawasi dengan baik. Semua tim harus bekerja sama dengan baik.

Manis di Kintamani, tepatnya di Desa Batu Dinding mengaku masih menerima bantuan Simantri sampai saat ini. Ia memberikan masukan tentang kelayakan penerima Simantri yang mestinya diberikan sertifikasi sejauh mana dan seperti apa keberhasilannya. Dinas terkait harus melakukan hal ini dengan melakukan pengawasan dengan serius, dan bantuan harus bergulir jangan kelompok itu-itu saja.

Menurut Sindha di Denpasar jika program ini berhasil kenapa ada sapi Bali yang produksinya menurun. Seberapa besar sapi Bali bisa berkembang di daerah sendiri,



Radar Bali

Jaksa Periksa Lima Staf Pemkab

Winasa akan Laporkan Tiga Ajudan

NEGARA - Usai pemeriksaan tersangka kasus perjalanan dinas di Pemkab Jembrana era kepemimpinan Bupati I Gede Winasa, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara memeriksa lagi lima staf Pemkab Jembrana. Mereka yang "dicokot" ini adalah orang yang disebut Winasa sebagai pelaku yang ikut mengajukan bukti atau keterangan palsu kepada penyidik, sehingga merugikan Winasa.

Kajari Negara Teguh Subroto, melalui Kasi Pidana Khusus Putu Sauca Arimbawa Tusan, mengatakan bahwa pihaknya sudah memeriksa lima orang staf Pemkab Jembrana. Mereka antara lain berinisial BI, AM, GP, DS, dan WW. Selain kelima staf Pemkab Jembrana tersebut, ikut diperiksa penyidik adalah penjaga malam di rumah Winasa, berinisial SP ■

► Baca **Jaksa...** Hal 35

Pemeriksaan Kasus Era Winasa

■ Staf yang Diperiksa :

BI, AM, GP, DS dan WW, juga penjaga malam di rumah Winasa, berinisial SP. Mereka yang diperiksa ini adalah orang-orang yang diduga terlibat dalam pengiriman surat keputusan (SK) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) kepada Winasa, meski Winasa mengaku tidak pernah dikirim SK TP-TGR

■ Ajudan yang akan Dipolisikan :

Tiga ajudan Bupati Jembrana era 2009-2010, yakni Oka, Nanda dan Dandit, dinilai Winasa memberi dokumen dan keterangan palsu



GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI



DONATUS OPENG/BALI EXPRESS

DUKA DI HARI TUA : Mantan Bupati Jembrana Gede Winasa, saat dijenguk sejumlah tokoh parpol Jembrana pendukung koalisi besar, di RSUD Negara, di tengah proses hukum kasus perjalanan dinas.

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 21



Sambungan

Sebut Gerakan Terstruktur Pojokkan Dirinya

■ JAKSA...

Sambungan dari hal 21

"Melihat dari nama-nama yang diperiksa kemarin, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pengiriman surat keputusan (SK) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) kepada Winasa," ujarnya. "Winasa menuding tidak pernah dikirim SK TP-TGR, namun mereka mengaku sudah memberikan itu kepada Winasa," tegas Suaca, kemarin (26/4).

Hal ini juga ditegaskan para staf tersebut saat diperiksa

lagi kemarin. Mereka umumnya mengaku membawa surat tersebut kepada Winasa dalam beberapa saat berbeda. Ada yang membawa surat tersebut kepada Winasa di rumahnya, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, dan ada yang membawa surat tersebut ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Negara.

"Menurut keterangan staf yang membawa SK TP-TGR ke rumahnya, di Tegalcangkring, dilakukan beberapa kali. Pada kali kedua, petugas sempat bertemu Winasa," imbuhnya. Tapi, dia tidak mau menerima

surat tersebut. Termasuk saat dibawa ke Rutan Negara pada 21 Juni 2011 lalu. Saat itu menurut keterangan para staf Pemkab Jembrana tersebut, Winasa enggan menerima SK TP-TGR dan menandatangani surat penolakan di atas kertas bermeterai.

Namun, semua keterangan ini dibantah Winasa saat dikonfirmasi kemarin (26/4) di RSUD Negara. Saat dijumpi Forkap dan kelompok parpol koalisi besar Jembrana, Winasa mengatakan surat itu tidak pernah diantar kepadanya. Seharusnya surat itu dikirim kepadanya

untuk mengetahui berapa besar perkiraan kerugian negara yang harus dibayar Winasa.

"Saya disodorkan bukti bahwa surat TP-TGR dikirim ke rumah saya di Tegalcangkring. Sebagai penerima surat adalah petugas jaga malam. Apakah surat dikirim malam-malam ke rumah saya," tanya Winasa.

Setelah surat yang dikirim malam-malam ke rumahnya di Tegalcangkring, ada fakta lain yang mengatakan, ada utusan yang datang ke Rutan Negara tanggal 21 Juni 2011 lalu untuk meminta tandatangan Winasa berkaitan dengan surat TP-

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 25

Radar Bali



Sambungan

TGR tersebut.

Tapi, setelah dicek ke buku tamu Rutan Negara, tidak ada tamu bernama Desi yang mengantar surat itu ke Rutan Negara untuk bertemu Winasa.

"Kejanggalan dan keterangan palsu yang diberikan beberapa saksi sebelumnya inilah yang akan saya laporkan ke polisi. Biar polisi yang menelusuri siapa saja pelaku yang bermain di balik keterangan dan bukti palsu itu," katanya.

Meski saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan di ruangan VIP Puri Rahayu No. 05 RSUD Negara (baru pindah pagi tadi), tidak membuat mantan Bupati Jembrana ini pasrah. Diam-diam dia menggandeng advokat Eka Lazuardi untuk melaporkan tiga ajudannya yang dinilai memberi keterangan dan data palsu kepada penyidik Kejari Negara dalam kasus perjalanan dinas Pemkab Jembrana yang menempatkan Winasa sebagai tersangka.

"Saya sudah mencapai kata sepakat dengan pengacara saya. Dalam beberapa hari ini kami segera melaporkan tiga ajusan saya ke Polda Bali terkait pemberian data dan keterangan palsu ke penyidik Kejari Negara. Tindakan ini harus saya lakukan untuk meluruskan hal yang tidak benar," tegas Winasa, kemarin.

Dia mengatakan, ketiga mantan ajudannya saat menjabat Bupati Jembrana tahun 2009-2010 itu adalah Oka, Nanda, dan Dandit. Ketiganya dinilai Winasa memberi dokumen dan keterangan palsu. Dokumen palsu yang dituding Winasa, diberikan ketiga mantan ajudannya ini kepada bendahara dan PPTK untuk diproses menjadi surat pertanggungjawaban. Akibatnya, kasus perjalanan dinas ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Selain memberi dokumen palsu kepada pihak terkait, ketiganya juga dinilai mem-

berikan keterangan palsu saat diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara," tuturnya. "Terutama dalam masalah pembelian 63 tiket perjalanan dinas yang dinilai palsu dan sekarang menjadi barang bukti di penyidik," tegas Winasa.

Dia juga mencium gelagat ada gerakan terstruktur untuk memojokkan dirinya. Pengakuan tiga orang mantan ajudan Winasa yang membeli 63 tiket tersebut pada Ami disebut Winasa sebagai keterangan palsu. Sebab tidak mungkin Ami menjual tiket. Karena dia bekerja sebagai staf biasa di Klinik Anita milik Winasa di Denpasar.

"Seingat saya, Ami hanya membelikan tiket buat saya setelah saya tidak jadi bupati lagi. Saat itu, dia membeli tiket untuk saya dan para saksi yang akan menghadiri sidang pemilihan bupati Jembrana di Mahkamah Konstitusi (MK)," terang Nurlaba, saat ditemui koran ini kemarin. (don/pit)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 35